BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita penerus bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masadepan, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia.¹ Anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak masih dalam keadaan tergantung belum mandiri dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan, agama dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa keawatiran maupun kesejahteraan. perlakuan khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan hak sipil, hak politik dan ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih baik, sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan dan

¹ Hadi Supeno, *Memahami Konvensi Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak*, Cetakan 1, Penerbit PT, Zalco Pratama, Jakarta, 2010, h.27

menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Dengandemikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi penerus masadepan akan menjadi tiang dan pondasi yang kuat baik bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Kejahatan sering terjadi terhadap anak. Kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk suatu tindakan yang tidak bermoral. Membebankan kejahatan kepada anak yang tidak bersalah secara berkesinambungan baik sengaja maupun tidak disengaja merupakan tindakan kejahatan moral atau kejahatan kemanusiaan. Salah satu bentuk yang merupakan kejahatan kemanusiaan adalah penculikan atau melarikan seorang anak dengan maksud tertentu. Belakangan ini kasus penculikan semakin meningkat. Sebagian besar kasus penculikan menjadikan anak-anak sebagai korbannya. kasus penculikan ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai motif seperti, untuk dijadikan anak, penyanderaan, seksual, eksploitasi, perdagangan anak dan sebagainya. Umumnya memang usia anak-anak memang rentan terhadap bahaya penculikan dikarenakan berbagai hal, seperti kurangnya proteksi orang tua terhadap anak serta kurangnya pembekalan terhadap anak bagaimana ketika ia menghadapi orang asing ketika berada di tempat umum. Sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia, penculikan anak termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebab, penculikan anak adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, direncanakan maupun tidak direncanakan secara melawan hukum yang membatasi hak asasi manusia seorang anak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap anak dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat kemanusiaanya, memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negaranya. Selain itu anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa. Penculikan anak berarti melanggar pasal 59 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dinyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya atau keluarganya secara bertentangan dengan kehendak si anak itu sendiri.

²Abdusalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 4, Penerbit PTIK, Jakarta, 2012, h.2

Anak butuh kasih sayang dari orang tua atau keluarganya untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dalam mengejar masa depannya. Apapun alasan dari kejahatan penculikan anak, berarti perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pidana dan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia pula.

Tindakan penculikan terhadap anak yang saat ini semakin meningkat, baik yang dilakukan oleh orang lain, maupun anggota keluarga. Banyak juga kasus yang terjadi pada anak dibawah umur, sampai masih tergolong balita, yang kadang dilakukan oleh keluarga dan orang terdekat. Menurut data dari Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2013-2014 ini kasus penculikan yang melibatkan balita mencapai 111 kasus. Untuk usia 6-17 tahun mencapai 7 kasus. Sedangkan usia 13-17 tahun mencapai 19 kasus. Dari penelusuran KPAI, kasus penculikan dilakukan oleh sindikat penculikan anak, keluarga dan orang terdekat. Pelaku penculikan saat ini bisa terjadi dimana saja. Bahkan, sindikat penculikan anak sudah masuk ke sekolah, rumah dan tempat publik untuk mencari target korbannya. Biasanya mereka mencari korban di lingkungan perumahan, sekolah dan tempat publik yang memberi ruang untuk beraksi.³ Penculikan adalah perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.⁴ Kasus penculikan anak bisa dijadikan sebagai salah satu tindakan yang dapat menimbulkan masalah pada perkembangan emosi dan kejiwaan mereka. Sebab penculikan dapat menimbulkan trauma mendalam yang terbawa hingga si anak sampai pada masa selanjutnya, yaitu remaja atau dewasa. Pakar hukum dan kriminolog Yesmil Anwar mengatakan bahwa kasus penculikan anak di Indonesia sebetulnya masih amatiran. Selain itu, penanganannya masih belum membuat jera penculik. Kemungkinan karena hukuman untuk penculik masih dianggap ringan, maka kasus penculikan pun seakan tidak pernah usai. Aparat kepolisian, mayoritas masih menggunakan

³Laporan Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia "KPAI" periode 2010 – 2014. www.kpai.go.id, di akses pada tanggal 28 maret 2015.

⁴Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Cetakan 3, Penerbit, PT.Alumni, Bandung, 2005, h.128

KUHP dalam sangkaan primer. Dengan KUHP sebagai sangkaan primer, ancaman hukumannya maksimal 8 tahun penjara. Dalam banyak kasus, tidak jarang hakim hanya mengganjar 1-2 tahun penjara sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selain itu, jika menggunakan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, penculik diancam 15 tahun penjara. Ancaman pun bisa lebih lama jika dalam aksi penculikan disertai tindakan kekerasan.

Penculikan yang selalu saja terjadi pada setiap harinya, tentunya hal ini menjadikan para orang tua merasa tidak aman dalam kesehariannya dan selalu saja dihantui ketakutan akan keselamatan anak-anak mereka. Penculik biasanya beraksi ketika korban lepas dari pengawasan orang tua yaitu saat korban keluar dari lingkungan rumah atau lingkungan sekolah. Anak yang bermain sendirian di dalam rumahpun sangat rawan menjadi sasaran penculikan. Apalagi kehidupan bermasyarakat di perkotaan seakan kurang peduli terhadap sesamanya. Pola kehidupan perkotaan tampak cenderung kepada sifat individualistis. Kota menjadi tempat untuk hidup sendiri. Berbagai ikatan sosial yang bersifat paguyuban menjadi kendur dan kabur. Hampir semua pola hidup ditentukan untuk mendahulukan kepentingan sendiri. Kondisi solidaritas sosial perkotaan yang menurun membuat aksi penculikan anak kian merajalela. Beragam modus operandi penculikan anak yang terjadi membuat orang tua harus dapat mengantisipasi untuk melindungi keselamatan anak. Orang tua yang mempunyai anak yang masih sekolah melakukan upaya dengan mengantar-jemput anaknya sewaktu sekolah. Namun pada kenyataannya tetap masih ada anak yang masih pulang sendirian karena orang tuanya sibuk bekerja. Anak yang dijemputpun terkadang luput dari perhatian orang tua, misalnya anak dibiarkan main dan jajan diluar lingkungan sekolah sedangkan penjemputnya ngobrol dengan penjemput lainnya. Pihak sekolah pun seakan terkesan kurang ketat karena membiarkan gerbang sekolah terbuka sehingga anak bebas keluar masuk sekolah. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengangkat masalah ini khususnya pada masalah penculikan anak usia taman kanak-kanak yaitu usia 4-6 tahun dengan alasan anak seusia ini sangat rentan menjadi sasaran kejahatan karena disamping fisiknya lemah juga anak usia taman kanak-kanak mudah terkena bujukan. Akhir-akhir ini banyak diberitakan baik dari media cetak dan elektronik memberitakan anak yang

menjadi korban penculikan. Salah satu diantaranya adalah kasus yang terjadi pada korban Fahrul Nabil Nasution berumur 3 Tahun, yang diculik oleh Mirnawati Lubis yang merupakan tetangga korban. Kejadian itu bermula ketika Mirnawati Lubis melitasi rumah korban dan dia mendengar suara tangisan yang berasal dari dalam rumah, lalu Mirnawati langsung masuk kedalam rumah untuk mengambil Fahrul lalu membawanya menuju rumah dengan tujuan untuk dijadikan anaknya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah penculikan anak dengan judul: *“Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban dari Tindak Pidana Penculikan studi kasusputusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No : 470/Pid. Sus/2014/PN. Psp.”*

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi yang telah penulis kemukakan diatas, beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagaikorban dari tindak pidana penculikan ?
- b. Apa faktor-faktor terjadinya penculikan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No: 470/Pid. Sus/2014/ PN.Psp

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi tersebut diatas, maka penulis akan membahas penelitian ini pada kasus penculikan anak dibawah umur, dengan mengambil studi kasus putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No : 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan
 - 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana penculikan.

2) Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya penculikan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No: 470/Pid. Sus/2014/PN.Psp.

b. Manfaat

1) Manfaat Teoritis

- a) Sebagai tambahan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur.
- b) Menambah wawasan dibidang ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai perlindungan anak dibawah umur.
- c) Sebagai bahan kajian bagi para prsktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umum.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penulisan ini, yakni menambah wawasan khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Teori adalah pisau analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Berdasarkan perumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsure suatu Negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu Negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Menurut Fitzgerald, perlindungan hukum bertujuan mengintergrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi

berbagai kepentingan dilain pihak.⁵ Perlindungan hokum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hokum kedalam bentuk perangkat, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hokum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia atau HAM menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang maha esa, merupakan anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang maha esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak lainnya.⁷ Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat 1 UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu kejahatan. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk

⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penetbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.53

⁶Ibid, h.54

⁷Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kegiatan kekerasan dan diskriminasi. Kaitan dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Termasuk perlindungan dalam bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Beragam pula tujuan penculikan tersebut. Ada yang untuk dijual kembali kepada suami istri yang menginginkan anak pungut. Ada yang akan dipelihara untuk dijadikan pembantu keluarga. Tragis sekali, anak tersebut diculik untuk diambil organ-organ penting dalam tubuhnya dan diperjualbelikan dengan harga tinggi. Tak kalah jahatnya, bila anak itu masih tergolong gadis di bawah umur, maka akan diperjualbelikan untuk dijadikan wanita Penjaja Seks Komersial (PSK). Kejahatan ini disebut (*human trafficking*) atau perdagangan orang. Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi PBB yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) tentunya sudah menyadari ancaman penculikan anak yang berujung pada perdagangan manusia. Belakangan, ancaman kejahatan ini telah diorganisasi secara internasional oleh kelompok pelaku sehingga perlu peraturan perundangan yang efektif.

Sebelumnya perangkat hukum yang mengatur tentang penculikan anak diatur dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan jo Pasal 77 KUHP jo Pasal 79 KUHP dan Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Belum lagi jika penculikan anak itu berhubungan dengan

kegiatan perdagangan orang, maka bisa dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan berbagai tingkatan kegiatan yang diancam maksimal pidana penjara 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar enam ratus juta rupiah. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁸ Indonesia telah mengeluarkan dua Undang-Undang yang diperuntukan untuk melindungi anak yaitu Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No 3 Tahun 1979 untuk melindungi anak yang merupakan pelaku tindak pidana. Dengan membedakannya dengan tata cara Peradilan yang dilakukan oleh orang dewasa. Sedangkan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 merupakan regulasi yang melindungi anak sebagai korban atas suatu tindak pidana.⁹

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penculikan tertuang dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 59, pasal 68.

⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, cetakan II, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, h.33

⁹Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Kerangka Konseptual

- 1) Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik bersifat preventif maupun represif untuk menegakan peraturan hukum.¹⁰
- 2) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹¹
- 3) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.¹²
- 4) Tindak pidana penculikan adalah kejahatan yang memiliki beberapa unsur pokok yakni membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, membawa pergi seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain untuk membuat korban dalam keadaan sengsara.¹³

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur Hukum Pidana dan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Hukum Acara Pidana dan teori-teori pembuktian.

Karena itu, Penulis akan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan anak di bawah umur dan dalam kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No : 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp.¹⁴ Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain sebagai berikut :

¹⁰Hilman Hadikusuma, Bahasa hukum Indonesia, Cetakan III, Penerbit, PT. Alumni, Bandung, 2005, h.128

¹¹*Ibid*, Hadi Supeno, h.28.

¹²*Ibid*, h.49.

¹³*Ibid*. h.128.

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13–14.

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No.470/Pid.Sus/2014/PN.Psp.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis dan buku.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, internet, koran, dan media-media lainnya.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCULIKAN

Dalam bab II penulis akan menguraikan pengertian mengenai tindak pidana, pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis pidana, tindak pidana penculikan.

BAB III TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DIBAWAH UMUR STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN No.470/Pid.Sus/2014/PN.Psp.

Dalam bab III penulis akan membahas mengenai kronologis kasus yang terdiri dari, posisi kasus, surat tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, dakwaan, pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa putusan.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DARI TINDAK PIDANA PENCULIKAN

Dalam bab IV penulis akan membahas mengenai analisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan yang terjadi, berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang sidempuan No : 470/Pid.Sus/2014/PN.Psp.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, kemudian penulis juga akan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi kepustakaan ilmiah.